

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ctk. Kedua Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, ctk. Pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, ctk. Kesembilan, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Dwi Kusumo Wardhani, Tohadi, dan Freida Fania, *Hukum Pendaftaran Tanah*, ctk. Pertama, Graha Ilmu, Jakarta, 2020.
- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, ctk. Kedua, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, ctk. Kelima, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Isnaini dan Aggraeni A. Lubis, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, ctk. Pertama, Pustaka Prima, Medan, 2022.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Muri Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, dan Peneliti Gabungan*, ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, ctk. Kedua Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, ctk. Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, ctk. Keenam, Prenada Media, Jakarta, 2017.

_____, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, ctk. Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 187.

B. Jurnal

Abdul Mutalib Saranani, Tinjauan Hukum tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Soail Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Edisi No. 3, Vol. 1, Dosen Universitas Lakidende, 2022.

Amaliyah, Muh. Amar Ma'ruf, Novytha Sary dan Syahril Gunawan Bitu, Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah, *Hermeneutika*, Edisi No. 1, Vol. 5, Fakultas Hukum, 2021.

Andi Batari, Farida Patittingi dan Chalis Al Rossi, Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendafran Tanah: Perpektif Kepastian Hukum, *Amanna Gappa*, Edisi No. 2, Vol. 29, Fakultas Hukum, 2021.

Andi Musfitha, Felicitas Sri Marniati, Amelia Nur Widyanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Akibat Tidak Diterapkan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Guna Pensertifikatan Tanah, *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Edisi No. 2, Vol. 5, Fakultas Hukum, 2025.

Arie Lestaro dan Erlina, Sistem Pendaftaran Tanah Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah di Indonesia, *Notary Law Journal*, Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum, 2022.

Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana*, Edisi No. 2, Vol. 12, Fakultas Hukum, 2018.

Diba Catur Ningtyas, Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA, *Court Review: Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 2, 2021.

Ferdy Nugraha, Asas *Contradictoire Delimitatie* Dalam Pendaftaran Tanah, *Unes Law Review*, No. 1, Vol. 5, Fakultas Hukum, 2022.

Hamidi dan Moh Abdul Latif, Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional,

- Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Edisi No. 1, Vol. 12, Fakultas Hukum, 2021.
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea, Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, *Negara Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 2, Fakultas Hukum, 2011.
- Hasnan Hasbi, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase, *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 21, Fakultas Hukum, 2019.
- Konstantina Renyaan, Penerapan Asas Cotradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Biak Numfor, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, No.1, Vol. 3, Fakultas Hukum, 2021.
- Mikha Ch. Kaunang, Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, *Lex Crime*, Edisi No. 4, Vol. 5, Fakultas Hukum, 2016.
- Mira Novana Ardani, Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum, *Gema Keadilan*, Edisi No. 3, Vol. 6, Fakultas Hukum, 2019.
- Reda Manthovani dan Istiqomah, Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Edisi No. 2, Vol. 2, Fakultas Hukum, 2017.
- Ridwan, Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 2, Vol. 7, Fakultas Hukum, 2013.
- Risma dan Muh Taufiq Amin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tanah di Pasar Ramba (Studi Kasus Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto), *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi No. 2, Vol. 5, Fakultas Hukum, 2023.
- Sisca Anindya Rachmawati, Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Lapangan Di Desa Bantul), *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Edisi No.1, Vol.3, Fakultas Hukum, 2021.
- Syafril Hamonangan Harahap, Pemberlakuan Asas *Contradictoire Delimitatie* Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015), *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Edisi No. , Vol. 4, Fakultas Hukum, 2021.

Theresia Supriyanti, Ardhi Arnanto, dan Jamaluddin Mahasari, Pengaturan dan Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kebume, *Widya Bhumi*, Edisi No. 1, Vol. 3, Fakultas Hukum, 2023.

Yustiana, Andi Bau Mallarangeng, Sulaeman Sagoni, Implikasi Hukum Kesalahan Penentuan Batas Dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Lalabatan Kabupaten Soppeng, *Legal: Journal of Law*, No. 1, Vol. 3, Fakultas Hukum, 2024.

Zuman Malaka, Kepemilikan Tanah dalam Konsep Positif Indonesia Hukum Adat dan Hukum Islam, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Edisi No. 1, Vol. 21, Fakultas Hukum, 2018.

C. Skripsi

Alvin Adi Irfana, “Evaluasi Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Pendaftaran Sporadis Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Di Kantor Pertanahan Pati”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan, 2024.

Tazkia Aulia Almaida, “Penerapan Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam Pembentukan Data Spasial Bidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Tingkat Kasasi) Nomor 539 K/TUN/2020.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan Tingkat Banding) Nomor 61/B/2020/PT.TUN-MDN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan Tingkat Pertama) Nomor 26/G/2019/PTUN.PLG.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Tingkat Kasasi) Nomor 214 K/TUN/2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Putusan Tingkat Banding) Nomor 218/B/2019/PT.TUN.MDN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan Tingkat Pertama) Nomor 4/G/2019/PTUN/PLG.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan Tingkat Pertama) Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.PBR.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelola, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

F. Internet

Arasy Pradana A. Aziz , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hak-atas-tanah-dan-yang-dapat-menjadi-pemegangnya-lt5eeb3b383296d/>, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024, pukul 19.12 WIB.

<https://www.atrbpn.go.id/sekilas>, Diakses pada tanggal 08 Oktober 2024, pukul 21.45 WIB.

Muhdany Yusuf Laksono dan Hilda B Alexander, <https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/09/183815021/ada-aturannya-ini-ragam-bentuk-patok-tanah-yang-bisa-digunakan?page=all>, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024, pukul 07.31 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-agraria-lt646201e7068e8/>, Diakses pada tanggal 4 Januari 2025, pukul 10:45 WIB.

Erizka Permatasari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-perpanjangan-dan-pembaharuan-hak-guna-usaha-hgu-1t5c13a9ece2113/>, Diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 20:10 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-tahapan-penanganan-sengketa-dan-konflik-pertanahan-1t600684253965f/#_ftn5. Diakses pada tanggal 4 Januari 2025, pukul 19:20 WIB.

Endang Hadrian, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan-wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--1t608be3152a869/>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2025, pukul 20:01 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-1t52897351a003f/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 21:17 WIB.

Sovia Hasanah, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-tanah-secara-massal-1t5902cfc843d40/>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2025, pukul 10:00 WIB.

<https://diy.atrbpn.go.id/sejarah-kementerian-atrbpn>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2025, pukul 21:54 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/210598/permen-agrariakepala-bpn-no-16-tahun-2020>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2025, pukul 23:43 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/210599/permen-agrariakepala-bpn-no-17-tahun-2020> , Diakses pada tanggal 8 Januari 2025, pukul 12:06 WIB.

<https://diy.atrbpn.go.id/tugas-dan-fungsi>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2025, pukul 15:43 WIB.

<https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2025, pukul 16:00 WIB.

<https://kbbi.web.id/asas>, Diakses pada tanggal 22 Maret 2025, pukul 11:54 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>, Pasal 14 dan 24, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 02:52 WIB.

Danica Adhitiawarman, <https://www.detik.com/properti/kepemilikan-rumah/d-7576066/tetangga-ribut-perkara-batas-tanah-begini-aturan-hukumnya>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2025, pukul 03:57 WIB.

G. Wawancara

Wawancara dengan, Hendry Tuli Wibowo, Kepala Seksi Pemetaan dan Tematik Tata Ruang, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, pada tanggal 12 Desember 2024.

Wawancara dengan, Robert Corneles William Pasiak, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, di Yogyakarta, pada tanggal 12 Desember 2024.

Wawancara dengan, Dadan Darmawan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya, pada tanggal 16 Desember 2024.

Wawancara dengan, Oryza Subekti, Petugas Ukur Seksi Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya, pada tanggal 16 Desember 2024.